



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

a. Kerangka Ekonomi Makro

1) Perkembangan Nilai PDRB

Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut produk regional. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Harga Berlaku Nilai (Rupiah)	Harga Konstan Nilai (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2017	16.255.100	12.436.050
2.	2018	17.493.240	13.065.840
3.	2019	18.807.650	13.793.060
4.	2020	18.838.670	13.566.170
5.	2021	19.856.870	14.064.750

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2022

Tabel II.1 tersebut menunjukkan PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan mengalami peningkatan di tahun 2021.

Tabel II.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2017	4,14
2.	2018	5,06
3.	2019	5,57
4.	2020	-1,64
5.	2021	3,68

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2022

Tabel II.2 tersebut menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo sebesar 4,14% meningkat di tahun 2018 menjadi 5,06% kemudian meningkat di



tahun 2019 menjadi sebesar 5,57% akan tetapi di tahun 2020 menurun secara signifikan menjadi -1,64%, sementara di 2021 meningkat menjadi 3,68%

2) Peran Masing-masing Sektor Dalam PDRB

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan, akan tetapi PDRB per kapita Kabupaten Wonosobo atas dasar harga konstan mengalami penurunan di tahun 2020 dan meningkat di 2021, berikut adalah penjelasannya:

a) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku

Penunjang utama PDRB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sedangkan yang terkecil adalah dari sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam Lampiran II.1 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2021 sebesar Rp6.025.200.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (2) Pertambangan dan Penggalian tahun 2021 sebesar Rp213.430.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (3) Industri Pengolahan tahun 2021 sebesar Rp3.661.160.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (4) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2021 sebesar Rp6.380.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2021 sebesar Rp20.950.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung selalu mengalami kenaikan;
- (6) Konstruksi tahun 2021 sebesar Rp1.365.240.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2021 sebesar Rp3.392.560.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (8) Transportasi dan Pergudangan tahun 2021 sebesar Rp774.130.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2021 sebesar Rp570.850.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;



- (10) Informasi dan Komunikasi tahun 2021 sebesar Rp317.520.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (11) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2021 sebesar Rp651.210.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung selalu mengalami kenaikan;
 - (12) Real Estate tahun 2021 sebesar Rp298.930.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung selalu mengalami kenaikan;
 - (13) Jasa Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp53.610.000.000,00 dan jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
 - (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2020 sebesar Rp460.070.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan, akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2021;
 - (15) Jasa Pendidikan tahun 2021 sebesar Rp1.296.730.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2021 sebesar Rp317.420.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
 - (17) Jasa Lainnya tahun 2021 sebesar Rp431.480.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan.
- b) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan

Penunjang utama PDRB ADHK Kabupaten Wonosobo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, sedangkan yang terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam Lampiran II.2 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2021 sebesar Rp4.210.790.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (2) Pertambangan dan Penggalan tahun 2021 sebesar Rp141.240.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (3) Industri Pengolahan tahun 2021 sebesar Rp2.443.790.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (4) Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2021 sebesar Rp5.410.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tahun 2021 sebesar Rp17.220.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;



- (6) Konstruksi tahun 2021 sebesar Rp931.600.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2021 sebesar Rp2.611.710.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (8) Transportasi dan Pergudangan tahun 2021 sebesar Rp 613.210.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2021 sebesar Rp422.970.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (10) Informasi dan Komunikasi tahun 2021 sebesar Rp324.930.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (11) Jasa Keuangan dan Asuransi tahun 2021 sebesar Rp415.530.000.000,00 dan jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (12) Real Estate tahun 2021 sebesar Rp243.340.000.000,00 dan jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (13) Jasa Perusahaan tahun 2021 sebesar Rp36.240.000.000,00 dan jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2021 sebesar Rp314.420.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (15) Jasa Pendidikan tahun 2021 sebesar Rp786.710.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021;
- (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun 2021 sebesar Rp214.260.000.000,00 jika diperhatikan sejak tahun 2019 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan;
- (17) Jasa Lainnya tahun 2021 sebesar Rp 331.380.000.000,00 jika diperhatikan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat di tahun 2021.

3) Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2019 laju inflasi di Kabupaten Wonosobo cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 inflasi sebesar 2,71 persen. Pada tahun 2016 laju inflasi di Kabupaten Wonosobo meningkat yaitu sebesar 2,97 persen dan kembali mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2017 sebesar 3,21 persen. Pada



tahun 2018 inflasi tercatat sebesar 3,52 persen. Sedangkan laju inflasi Kabupaten Wonosobo tahun 2019 menurun sebesar 2,28 persen. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 s/d 2019

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2015	2,71
2.	2016	2,97
3.	2017	3,21
4.	2018	3,52
5.	2019	2,28

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2020

4) PDRB Per Kapita

Tolok ukur lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro di tingkat dalam lingkup regional adalah produk regional bruto per kapita. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo tahun 2015-2019 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dengan rincian disajikan dalam tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.4 Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kab. Wonosobo Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	Harga Konstan (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2017	20.731	15.860
2.	2018	22.218	16.595
3.	2019	23.852	17.456
4.	2020*	18.838	13.566
5.	2021**	19.856	14.064

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2021

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

5) Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,26 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang menganggur. Angka ini sedikit



mengalami penurunan jika dibanding tahun 2020 yaitu 5,37 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo tahun 2019 s/d 2021 untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.5 berikut ini.

**Tabel II.5 Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2019 s/d 2021**

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2019	3,43
2.	2020	5,37
3.	2021	5,26

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022

6) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Wonosobo selama tahun 2017 s/d 2021 mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.6 berikut ini.

**Tabel II.6 Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2017 s/d 2021**

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
1.	2017	66,89
2.	2018	67,81
3.	2019	68,27
4.	2020	68,22
5.	2021	68,43

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022

7) Angka Kemiskinan

Pengukuran angka kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 s/d 2021 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.7 berikut ini.



**Tabel II.7 Angka Kemiskinan
Kabupaten Wonosobo TA 2017 s/d
2021**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2017	308.553	159,20	20,32
2.	2018	323.490	138,32	17,58
3.	2019	340.827	131,35	16,63
4.	2020	362.683	137,64	17,36
5.	2021	373.474	139,67	17,67

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022

Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.8 berikut ini.

**Tabel II.8 Indeks kedalaman
kemiskinan (P1) dan indeks keparahan
kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2017 s/d 2021**

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2017	3,85	1,10
2.	2018	3,25	0,78
3.	2019	2,44	0,46
4.	2020	2,43	0,47
5.	2021	2,75	0,65

Sumber: Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2022

b. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dengan potensi yang dimiliki diperkirakan akan tetap mengandalkan sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu pada sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa, serta industri pengolahan serta sektor andalan lain. Sektor andalan lain yaitu angkutan dan komunikasi, bank, persewaan dan jasa perusahaan serta bangunan. Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2021, serta arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka diharapkan sektor primer tetap berkembang sejalan dengan potensi yang dimiliki



oleh Kabupaten Wonosobo yaitu sektor pariwisata dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2017-2019 cenderung meningkat dan berada pada rentang 4-5 persen.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2021. Target sasaran pembangunan tahun 2021 disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19 antara lain meliputi :

- 1) Pertumbuhan ekonomi antara (-2) -1 %
- 2) PDRB per kapita sebesar Rp. 17,1 juta
- 3) Inflasi pada angka 3, 0+1
- 4) Kemiskinan turun menjadi 16,7%- 17%
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33- 5 %
- 6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,2
- 7) Indeks Gini sebesar 0,34
- 8) Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,97
- 9) Indeks Williamson sebesar 0,3

c. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Daerah

Berdasarkan Tabel II.1 di atas perekonomian Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Nilai tambah yang dihasilkan dari PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.018.200.000,00, sedangkan jika dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp498.580.000,00 dibanding tahun 2020.

Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 sebesar 5,57 persen mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 sebesar (1,64) persen. Lalu meningkat signifikan di 2021 menjadi 3,68 persen. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2020 negatif karena adanya pandemi covid-19 yang pada tahun 2020 masih berlangsung sehingga menyebabkan banyak kegiatan sektor ekonomi baik masyarakat maupun pemerintahan tidak dapat beroperasi. Apabila melihat dari PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2021 terdapat 6 sektor yang mengalami peningkatan setelah di 2020 mengalami penurunan antara lain:

- 1) Sektor konstruksi mengalami peningkatan sebesar Rp58.770.000.000,00 atau 6,73 persen dibanding tahun 2020;
- 2) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan sebesar Rp176.440.000.000,00 atau 7,25 persen dibanding tahun 2020;
- 3) Sektor transportasi dan perdagangan mengalami peningkatan sebesar Rp16.170.000.000,00 atau 2,71 persen dibanding tahun 2020;
- 4) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan sebesar Rp24.870.000.000,00 atau 6,25 persen dibanding tahun 2020;
- 5) Sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 2,84 persen dibanding tahun 2020;
- 6) Sektor jasa lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp2.320.000.000,00 atau 0,71 persen dibanding tahun 2020.



Sementara itu, berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 terdapat 7 dari 17 sektor yang mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19 kemudian meningkat di 2021 antara lain:

- 1) Sektor konstruksi mengalami peningkatan sebesar Rp127.740.000.000,00 atau 10,32 persen dibanding tahun 2020;
- 2) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan sebesar Rp270.420.000.000,00 atau 8,66 persen dibanding tahun 2020;
- 3) Sektor transportasi dan perdagangan mengalami peningkatan sebesar Rp42.550.000.000,00 atau 5,82 persen dibanding tahun 2020;
- 4) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan sebesar Rp42.230.000.000,00 atau 8,19 persen dibanding tahun 2020;
- 5) Sektor real estat mengalami peningkatan sebesar Rp8.750.000.000,00 atau 3,02 persen dibanding tahun 2020;
- 6) Sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp2.020.000.000,00 atau 3,92 persen dibanding tahun 2020;
- 7) Sektor jasa lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp7.630.000.000,00 atau 1,80 persen dibanding tahun 2020.

2. Kebijakan Keuangan

a. Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 berorientasi pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2021, serta RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025 tahap IV yaitu tahap pengembangan kegiatan pembangunan di semua bidang, dengan arah kebijakan pada pengembangan dan peningkatan kualitas output yang berupa pelayanan publik dan produksi daerah, serta berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024, RKP 2021, dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) serta Proyek Strategis Nasional. RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 merupakan implementasi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan tema “Pemulihan Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah”.

RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode



masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2021-2026 dengan visi “Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera” dengan misi

- 1) Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
- 3) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
- 5) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kesinambungan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang. RKPd Kabupaten Wonosobo tahun 2021 disusun dengan memperhatikan situasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang dimulai bulan Maret 2020 dan diprediksi akan berlangsung lama serta berpengaruh kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan sesuai keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya. Di samping itu juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berkaitan dengan pendapatan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah Tahun 2021 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah
 - b) Retribusi Daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain PAD yang sah
- b. Pendapatan Transfer
 - a) Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:



1. Dana Perimbangan
2. Dana Insentif Daerah
3. Dana Otonomi Khusus
4. Dana Keistimewaan
5. Dana Desa
- b) Transfer Antar Daerah
- c) Dana Alokasi Khusus
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - a) Hibah
 - b) Dana darurat
 - c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo antara lain:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan peningkatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk dioptimalkan, antara lain melalui peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan, promosi potensi investasi, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan BUMD secara profesional sehingga diharapkan mampu berdaya saing dan dapat meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD Kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan;
- 3) Pengembangan sistem pemungutan dan administrasi pendapatan daerah serta retribusi berbasis online;
- 4) Pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.
- 5) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan.

c. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Struktur belanja daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Untuk tahun 2021, struktur belanja daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dengan upaya sebagai berikut:



1. Pemulihan ekonomi masyarakat, dunia usaha (UKM/IKM), tenaga kerja dan pariwisata terdampak Covid-19
2. Peningkatan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 dalam bentuk jaring pengaman sosial
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
4. Penanganan masalah sosial dampak pandemi Covid-19.
5. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana.
6. Pemenuhan alokasi persentase belanja untuk urusan pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 10%, infrastruktur dan pengawasan sesuai peraturan dengan prioritas pemulihan dampak Covid-19.
7. Pengalokasian belanja pada program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum koordinasi di bidang perencanaan.
8. Pengalokasian belanja bantuan sosial maupun hibah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
9. Pemrioritasan belanja yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan dengan prioritas pada penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur.

d. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka perbaikan kinerja BUMD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara rinci kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

- 1) Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan apabila terjadi defisit sedapat mungkin bisa ditutup dengan SiLPA tahun lalu;
- 2) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2022, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;



- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan, diarahkan untuk:

- 1) Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- 2) Pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat strategis misalnya belanja pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dana cadangan bencana alam.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Estimasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Estimasi Pendapatan Daerah TA 2021 dengan rincian disajikan dalam tabel II.9 berikut ini.

Tabel II.9 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7) /(3)*10 0
1	Pendapatan Asli Daerah	236.403.478.344,00	12,45	238.073.145.205,00	12,62	1.669.666.861,00	0,71
2	Pendapatan Transfer	1.546.730.145.485,00	81,48	1.529.558.041.880,00	81,06	(27.814.136.958,00)	(2,35)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	115.072.850.000,00	6,06	119.114.336.000,00	6,31	4.041.486.000,00	3,51
	JUMLAH	1.898.206.473.829,00	100,00	1.886.745.523.085,00	100,00	(22.102.984.097,00)	(1,44)

Perbandingan Estimasi Pendapatan TA 2021 dengan TA 2020 untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dalam tabel II.10 berikut ini.

Tabel II.10 Estimasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7) /(5)*10 0
1.	Pendapatan Asli Daerah	238.073.145.205,00	12,62	211.165.763.773,00	11,07	26.907.381.432,00	14,10
2.	Pendapatan Transfer	1.529.558.041.880,00	81,06	1.145.224.575.858,00	60,49	384.333.466.022,00	1,40
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	119.114.336.000,00	6,31	535.897.267.000,00	28,44	(416.782.931.000,00)	(77,77)



No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
	JUMLAH	1.886.745.523.085,00	100,00	1.892.287.606.631,00	100,00	(371.454.560.621,00)	(19,71)

1) Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel II.9 di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan TA 2021 diestimasikan mengalami kenaikan dari Rp236.403.478.344,00 menjadi Rp238.073.145.205,00 atau naik sekitar 0,71 persen dengan rincian disajikan dalam tabel II.11 berikut ini.

Tabel II.11 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1	Pajak Daerah	47.015.000.000,00	19,89	47.015.000.000,00	19,75	-	-
2	Retribusi Daerah	10.187.290.000,00	4,31	10.187.290.000,00	4,28	-	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.328.421.612,00	8,60	20.328.421.612,00	8,54	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	158.872.766.732,00	67,20	160.542.433.593,00	67,43	1.669.666.861,00	1,05
	JUMLAH	236.403.478.344,00	100,00	238.073.145.205,00	100,00	1.669.666.861,00	0,71

Tabel II.11 tersebut menunjukkan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan, sedangkan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen.

Tabel II.10 di atas menunjukkan bahwa Estimasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 setelah perubahan jika dibandingkan dengan estimasi TA 2020 setelah perubahan cenderung mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.12 berikut ini.

Tabel II.12 Estimasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pajak Daerah	47.015.000.000,00	19,75	39.336.900.000,00	18,85	7.678.100.000,00	16,33
2.	Retribusi Daerah	10.187.290.000,00	4,28	6.871.370.200,00	3,29	3.315.919.800,00	32,54
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang	20.328.421.612,00	8,54	20.761.198.435,00	9,95	(432.776.823,00)	(2,12)



No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5) *100
	Dipisahkan						
	Lain-lain						
	Pendapatan						
	Asli Daerah						
4.	Yang Sah	160.542.433.593,00	67,43	141.680.495.138,00	67,90	16.346.138.455,00	10,18
	JUMLAH	238.073.145.205,00	100,00	208.649.963.773,00	100,00	26.907.381.432,00	4,23

2) Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel II.9 di atas Pendapatan Transfer yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan / Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga diestimasikan mengalami penurunan secara keseluruhan. Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp27.814.136.958,00 atau 2,35 persen. Penurunan untuk Dana Alokasi Umum menurun 3,20 persen, Dana Alokasi Khusus menurun sebesar 0,94 persen dengan rincian disajikan dalam tabel II.13 berikut ini.

Tabel II.13 Estimasi Perubahan Target Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/ (3)*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	0
	Pendapatan						
	Transfer						
	Pemerintah						
1	Pusat	1.412.968.581.485,00	91,35	1.385.154.444.527,00	90,66	27.814.136.958,00	1,96
	Pendapatan						
	Transfer						
2	Antar Daerah	133.761.564.000,00	8,65	144.403.597.353,00	9,44	(10.642.033.353,00)	(7,95)
	JUMLAH	1.546.730.145.485,00	100,00	1.529.558.041.880,00	100,00	17.172.103.605,00	(5,99)

Tabel II.10 di atas menunjukkan estimasi Dana Perimbangan Tahun 2021 setelah perubahan dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.14 berikut ini.

Tabel II.14 Estimasi Pendapatan Transfer Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/ (5)*100
	Pendapatan						
	Transfer						
	Pemerintah						
1.	Pusat	1.385.154.444.527,00	90,66	1.402.362.838.580,00	89,47	(17.208.394.053,00)	(1,24)



No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
	Dana Perimbangan	1.155.966.509.527,00	83,45	1.140.061.320.580,00	81,29	15.905.188.947,00	13,75
	Dana Insentif Daerah	10.459.270.000,00	0,75	45.074.667.000,00	3,21	(34.615.397.000,00)	(330)
	Dana Desa	218.728.665.000,00	15,79	217.226.851.000,00	15,49	1.501.814.000,00	0,68
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.403.597.353,00	9,44	165.098.149.000,00	10,53	(20.694.551.647,00)	(13,33)
	Pendapatan Bagi Hasil	115.123.597.353,00	79,72	102.666.149.000,00	62,18	12.457.448.353,00	10,8
	Bantuan Keuangan	29.280.000.000,00	20,28	62.432.000.000,00	37,82	(33.152.000.000,00)	(113,2)
	JUMLAH	1.529.558.041.880,00	100,00	1.567.460.987.580,00	100,00	(37.902.945.700,00)	(14,54)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel II.9 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diestimasikan mengalami kenaikan sebesar Rp119.114.336.000,00 atau 3,51 persen dari target awal sebesar Rp115.072.850.000,00. Kenaikan ini terjadi pada Pendapatan Hibah Dana BOS.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.15 berikut ini.

Tabel II.15 Estimasi Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Pendapatan Hibah	35.997.000.000,00	31,28	35.997.000.000,00	30,22	-	-
	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan-undangan	79.075.850.000,00	68,72	83.117.336.000,00	69,78	4.041.486.000,00	5,11
	JUMLAH	115.072.850.000,00	100,00	119.114.336.000,00	100,00	4.041.486.000,00	5,11

Jika dilihat Tabel II.10 di atas menunjukkan estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 setelah perubahan dibandingkan dengan TA



2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.16 berikut ini

Tabel II.16 Estimasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Pendapatan Hibah	35.997.000.000,00	30,22	108.497.600.000,00	100,00	(72.500.600.000)	(201,4)
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Perundang-undangan	83.117.336.000,00	69,78	-	-	83.117.336.000,00	100
JUMLAH		119.114.336.000,00	100,00	108.497.600.000,00	100,00	(126.308.734.647,00)	(101,4)

b. Indikator Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan. Belanja daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.749.511.980.944,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen dari APBD Penetapan tahun 2021 yaitu Rp2.793.785.426.923,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.17 berikut ini

Tabel II.17 Proyeksi Perubahan Target Belanja Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan		Anggaran Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Belanja Tidak Langsung	1.162.110.909.665,00	59,10	1.177.551.814.061,00	58,10	(15.440.904.396,00)	1,33
2.	Belanja Langsung	805.635.320.784,00	40,90	849.121.361.490,00	41,90	(43.486.040.706,00)	1,82
JUMLAH		1.967.746.230.449,00	100,00	2.026.673.175.551,00	100,00	44.273.445.979,00	1,61

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Wonosobo setelah perubahan APBD TA 2021 jika dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.18 berikut ini.



Tabel II.18 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7) /(5)*100
1.	Belanja Tidak Langsung	1.177.551.814.061,00	58,10	1.196.130.160.127,00	58,78	(18.578.346.066,00)	(1,55)
2.	Belanja Langsung	849.121.361.490,00	41,90	838.681.806.036,00	41,22	10.439.555.454,00	92,71
JUMLAH		2.026.673.175.551,00	100,00	2.034.811.966.163,00	100,00	758.973.460.760,00	37,30

1) Belanja Tidak Langsung

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung diproyeksikan sebesar Rp1.177.551.814.061,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,55 persen. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.19 berikut ini

Tabel II.19 Proyeksi Perubahan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7) /(3)*100
1.	Belanja Pegawai	781.765.750.495,00	67,27	767.112.251.372,00	65,14	(14.653.499.123,00)	(1,87)
2.	Belanja Hibah	31.167.098.600,00	2,68	56.930.802.115,00	4,83	25.763.703.515,00	82,66
3.	Belanja Bantuan Sosial	12.044.157.500,00	1,04	15.891.542.451,00	1,35	3.847.384.951,00	31,94
4.	Belanja Bagi Hasil	5.720.229.000,00	0,49	6.077.744.053,00	0,52	357.515.053,00	6,25
5.	Belanja Bantuan Keuangan	326.413.674.070,00	28,09	326.539.474.070,00	27,73	125.800.000,00	0,04
6.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,43	5.000.000.000,00	0,42	-	-
JUMLAH		1.162.110.909.665,00	100	1.177.551.814.061,00	100	15.440.904.396,00	1,33

Tabel II.19 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Tidak Langsung pada APBD setelah perubahan TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.20 berikut ini.



Tabel II.20 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/ (5)*100
1.	Belanja Pegawai	767.112.251.372,00	65,14	721.328.577.384,00	60,31	45.783.673.988,00	6,35
2.	Belanja Hibah	56.930.802.115,00	4,83	77.517.713.500,00	6,48	(20.586.911.385,00)	(26,56)
3.	Belanja Bantuan Sosial	15.891.542.451,00	1,35	7.583.900.000,00	0,63	8.307.642.451,00	109,54
4.	Belanja Bagi Hasil	6.077.744.053,00	0,52	5.378.316.287,00	0,45	699.427.766,00	13,00
5.	Belanja Bantuan Keuangan	326.539.474.070,00	27,73	339.029.084.560,00	28,34	(12.489.610.490,00)	(3,68)
6.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,42	45.292.568.396,00	3,79	(40.292.568.396,00)	(88,96)
JUMLAH		1.177.551.814.061,00	100,00	1.196.130.160.127,00	100,00	(18.578.346.066,00)	(1,55)

2) Belanja Langsung

Tabel II.17 di atas menunjukkan bahwa Belanja Langsung diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 8,02 persen dari Rp805.635.320.784,00 menjadi Rp849.121.361.490,00 Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.21 berikut ini.

Tabel II.21 Proyeksi Perubahan Belanja Langsung Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	%			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/ (3)*100
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2.	Belanja Barang dan Jasa	492.154.502.318,00	61,19	542.708.033.285,00	63,92	50.553.530.967,00	10,27
3.	Belanja Modal	313.480.818.466,00	38,91	306.413.328.205,00	36,08	(7.067.490.261,00)	(2,25)
JUMLAH		805.635.320.784,00	100,00	849.121.361.490,00	100,00	43.486.040.706,00	8,02

Tabel II.18 di atas menunjukkan bahwa proyeksi Belanja Langsung setelah perubahan APBD TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami kenaikan dengan rincian disajikan dalam tabel II.22 berikut ini.



Tabel II.22 Proyeksi Belanja Langsung Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Belanja Pegawai	-	-	60.010.918.225,00	-	60.010.918.225,00	-
2.	Belanja Barang dan Jasa	542.708.033.285,00	63,92	494.059.883.769,00	58,91	48.648.149.516,00	9,85
3.	Belanja Modal	306.413.328.205,00	36,08	284.611.004.042,00	33,94	21.802.324.163,00	7,66
JUMLAH		849.121.361.490,00	100,00	838.681.806.036,00	100,00	130.461.391.904,00	16,51

c. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Kabupaten Wonosobo TA 2021 diestimasikan akan mengalami kenaikan sehingga dilakukan perubahan yang sebelumnya sebesar Rp69.539.756.620,00 menjadi Rp139.927.652.466,00 Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.23 berikut ini.

Tabel II.23 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2020

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan		Anggaran Setelah Perubahan		Bertambah/ (Berkurang)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	84.067.756.620,00	120,89	154.455.652.466,00	110,38	70.387.895.846,00	83,73
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.528.000.000,00	20,89	14.528.000.000,00	10,38	-	-
Pembiayaan Netto (1-2)		69.539.756.620,00	100,00	139.927.652.466,00	100,00	70.387.895.846,00	101,22

Rencana Pembiayaan Netto pada APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo TA 2021 jika dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.24 berikut ini.

Tabel II.24 Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	154.455.652.466,00	110,38	173.138.414.810,00	115,27	(18.682.762.344,00)	(10,79)
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.528.000.000,00	10,38	22.935.000.000,00	15,27	(8.407.000.000,00)	(36,66)
Pembiayaan Netto		139.927.652.466,00	100,00	150.203.414.810,00	100,00	(10.275.762.344,00)	(6,84)



1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tabel II.23 menunjukkan bahwa estimasi rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 adalah sebesar Rp154.455.652.466,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.25 berikut ini.

Tabel II.25 Estimasi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/ (3)*100
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	84.067.756.620,00	100,00	154.455.652.466,00	100,00	70.387.895.846,00	83,73
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		84.067.756.620,00	100,00	154.455.652.466,00	100,00	70.387.895.846,00	83,73

Tabel II.24 di atas menunjukkan estimasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 jika dibandingkan dengan TA 2020 cenderung mengalami penurunan dengan rincian disajikan dalam tabel II.26 berikut ini.

Tabel II.26 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	154.455.652.466,00	100,00	148.138.414.810,00	85,56	6.317.237.656,00	4,26
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	25.000.000.000,00	14,44	(25.000.000.000,00)	-
JUMLAH		154.455.652.466,00	100,00	173.138.414.810,00	100,00	18.682.762.344,00	10,79

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tabel II.23 di atas menunjukkan bahwa estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2021 dialokasikan sepenuhnya untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka perbaikan kinerja BUMD sebesar Rp14.528.000.000,00. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel II.27 berikut ini.



Tabel II.27 Estimasi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	%	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(3)	(8)=(7)/(3))*100
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah :	14.528.000.000,00	100,00	14.528.000.000,00	100,00	-	-
	JUMLAH	14.528.000.000,00	100,00	14.528.000.000,00	100,00	-	-

Tabel II.24 di atas menunjukkan bahwa estimasi Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Perubahan TA 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2020 dengan rincian disajikan dalam tabel II.28 berikut ini.

Tabel II.28 Estimasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Wonosobo TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA 2021		TA 2020		Kenaikan / (Penurunan)	
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
A.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
B.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah:	14.528.000.000,00	100,00	22.935.000.000,00	100,00	(8.407.000.000,00)	(36,66)
1.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	-	5.935.000.000,00	25,88	(5.935.000.000,00)	(100,00)
2.	PD. BPR BKK Wonosobo	-	-	-	-	-	-
3.	PD. BKK Jateng (Perseroda)	-	-	-	-	-	-
4.	PD. BKK Kertek	-	-	-	-	-	-
5.	PT. BPR Bank Wonosobo	-	-	-	-	-	-
6.	Perusda PDAM	14.528.000.000,00	100,00	16.500.000.000,00	71,94	(1.972.000.000,00)	(11,95)
7.	PD. Bhakti Husada	-	-	500.000.000,00	2,18	(500.000.000,00)	-
8.	PT Bimo Lukar	-	-	-	-	-	-
9.	PT. PRPP Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
10.	PT. Global Dharma Asri	-	-	-	-	-	-
11.	PT Tambi	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	14.528.000.000,00	100,00	22.935.000.000,00	100,00	(8.407.000.000,00)	(36,66)



d. Perubahan APBD Akibat *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penanganan pandemi covid-19. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya, antara lain menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25 % untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dalam rangka meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memprioritaskan penggunaan APBD untukantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021. Alokasi-alokasi dana yang mengalami perubahan akibat pergeseran anggaran untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran II.3 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp26.217.564.000,00 atau (3,20) persen;
- 2) Dana Alokasi Khusus setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.077.316.000,00 atau (0,94) persen;
- 3) Belanja Pegawai setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp32.243.794.267,00 atau (4,12) persen;
- 4) Belanja Hibah setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp26.427.930.350,00 atau (84,79);
- 5) Belanja Bantuan Sosial setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.663.172.300,00 atau (22,11) persen;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp125.800.000,00 atau (0,04) persen;
- 7) Belanja Pegawai setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp32.243.794.267,00 atau (4,12) persen;
- 8) Belanja Barang dan Jasa setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.166.714.322,00 atau (2,07) persen;
- 9) Belanja Modal setelah dilakukan pergeseran APBD tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp31.108.358.105,00 atau (9,92) persen.

e. Belanja Kegiatan Penanganan Covid-19 dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga terhadap Penanganan Covid-19

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan *refocussing* dan realokasi APBD dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Rincian



anggaran dan realisasi penanganan Covid-19 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran TVI.2 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan APBD untuk penanganan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp72.415.635.551,00 terealisasi sebesar Rp50.414.784.902,00 atau 69,62 persen;
- 2) Penggunaan APBD untuk penanganan dampak ekonomi dengan anggaran sebesar Rp16.475.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.841.379.630,00 atau 35,46 persen;
- 3) Penggunaan APBD untuk penyediaan jaring pengaman sosial dengan anggaran Rp36.361.043.222,00 terealisasi sebesar Rp32.037.753.359,00 atau 88,11 persen.